



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. RACHMAT ROGIANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 672805

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.706.074.688
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/164 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 871.959.240		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 936.462.000		
3. Tanah Seluas 1.565 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 479.006.892		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 418.646.556		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	165.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	515.259
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.871.589.947
III. HUTANG	Rp.	321.791.968
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.549.797.979



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RINTO YUWONO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **17094**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.110.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
4. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
5. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 722 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.044.000.000**



1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
5. MOBIL, PROTON MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
6. MOBIL, MITSUBHISI MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
7. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 445.000.000
8. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
9. MOBIL, MITSUBISHI T 120 SS PU 1.5 FD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
10. MOTOR, HONDA R5F 04R24L1 M/T /SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 40.500.000
11. MOBIL, MAZDA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	86.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	247.845.553
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.487.845.553
III. HUTANG	Rp.	297.464.325
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.190.381.228

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHADI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **651811**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.533.000.000**

1. Tanah Seluas 250 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/22 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2.550 m2/25 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 204.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m2/100 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 367.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 2.500 m2/50 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 1.590 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **338.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **737.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.907.760
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.668.907.760
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.668.907.760

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. NUGRAHA DANANJAYA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 462715

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.740.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 201 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000		
4. Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	347.900.000
1. MOBIL, HYUNDAI MINI BUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 327.400.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	76.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.842.591
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.199.742.591
III. HUTANG	Rp.	445.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.754.742.591



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : MEZFI INDRIANI
- Jabatan** : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
- NHK** : 1013455

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.055.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.055.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPENDI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 726253

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.130.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/100 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000		
2. Tanah Seluas 1.407 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/99 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000		
4. Tanah Seluas 133 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	266.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000		
2. MOBIL, MITHSUBISI XPANDER EXCEED Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
3. MOTOR, HONDA PCX 160 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	29.700.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.575.205
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.447.275.205



III. HUTANG

Rp. 120.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.327.275.205

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.